

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia (*Analysis of Fiscal Policy Impact toward the National Income in Indonesia*)

Nur Diana Arofah, Regina Niken Wilantari, Teguh Hadi Priyono
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: arofah_nurdiana@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto riil (PDB riil) Indonesia, dengan menggunakan data runtun waktu selama periode 1984 sampai dengan 2015. Hasil analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar sehingga memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan positif terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Hal ini karena pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi penerimaannya sehingga sering terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran menyebabkan timbulnya inflasi dan menurunkan PDB riil. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB riil membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: pajak, non pajak, pengeluaran pemerintah, dan PDB riil.

Abstract

This study aims to analyze the impact of fiscal policy on Indonesia's national income as measured by real Gross Domestic Product (real GDP) of Indonesia, using time series data during the period from 1984 to 2015. The results of the analysis using Ordinary Least Square method (OLS) explained that the implementation of fiscal policy in Indonesia through tax revenues and significant positive effect on real GDP in Indonesia. Tax is the largest state revenue that has an important role in financing the activities of state and reduce the budget deficit in Indonesia. Meanwhile, non-tax revenue and a significant negative effect on real GDP in Indonesia. By contrast, government expenditure is not significant and positive impact on national income in Indonesia. This is because government spending in Indonesia has always exceeded revenues so often the case the budget deficit. Budget deficits cause inflation and lower real GDP. The existence of a positive relationship between government spending to real GDP proves that government spending plays an important role in the smooth running of economic activity.

Key words: tax, non tax revenue, government spending, real GDP.

Pendahuluan

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari gejolak siklus ekonomi, suatu negara pernah berada pada masa resesi/depresi dan masa pemulihan/*boom* yang dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Perekonomian yang berada pada masa resesi dapat dicegah dan diatasi salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian melalui penyesuaian dibidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Secara spesifik, tujuan utama kebijakan fiskal adalah tercapainya kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga (Rahayu, 2010:3). Kebijakan fiskal mulai dikenal ketika John Maynard Keynes mengutarakan pendapatnya, bahwa kebijakan fiskal adalah

kebijakan yang paling efektif dalam mempengaruhi jalannya perekonomian terutama dalam memberantas pengangguran dan meningkatkan output, melalui campur tangan pemerintah dalam perekonomian. (Deliarnov, 2010:170). Sedangkan dari sisi lain, kaum klasik lebih menekankan kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian. Menurutnya, kebijakan fiskal kurang efektif dalam mengatasi masalah perekonomian karena memiliki efek *crowding out* dalam kebijakan tersebut dan hanya akan meningkatkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi serta tidak berpengaruh pada pendapatan nasional. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan stabilisasi makroekonomi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi siklus ekonomi.

Dalam konteks pembangunan, kebijakan fiskal berfungsi baik sebagai alat stabilisasi makroekonomi dan sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan serta membrantas kemiskinan (*World Bank*, 2006). Setiap kebijakan fiskal didesain untuk mampu meningkatkan pendapatan nasional dan mengendalikan inflasi yang akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB riil). Setelah krisis global 2008, pemerintah Indonesia cenderung meningkatkan intensitas kebijakan fiskal di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai paket stimulus fiskal telah dijalankan untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB, baik melalui pemotongan pajak perusahaan, keringanan pajak perdagangan, kemudahan layanan investasi, dan lain sebagainya.

Kebijakan fiskal berpengaruh langsung pada permintaan dan penawaran agregat. Ketika perekonomian mengalami masa resesi bahkan depresi sangat sesuai menerapkan kebijakan permintaan agregat yang bersifat ekspansif, dan sebaliknya. Terjadinya resesi akan menurunkan permintaan agregat khususnya konsumsi dan investasi sehingga akan menghambat proses produksi yang akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Aktivitas ekonomi dapat dikendalikan melalui instrumen fiskal karena variabel tersebut akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan, stabilitas harga yang akan menahan laju inflasi ataupun deflasi, kesempatan kerja dan mencapai pertumbuhan PDB yang diinginkan.

Menurut Samuelson (1985), belanja pemerintah akan berpengaruh pada konsumsi total dan penerimaan agregat sedangkan penerimaan perpajakan mengurangi pendapatan, mengurangi penerimaan modal dan output potensial. Begitu juga menurut Keynes, yang meyakini bahwa melalui pengaturan pada instrumen fiskal akan mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa karena akan mempengaruhi permintaan agregat yang dapat mengubah keseimbangan harga pasar. Dengan demikian, pengaturan kebijakan fiskal akan berdampak pada inflasi dan pertumbuhan PDB. Berdasarkan data dari *World Bank* dan BPS, menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah selalu melebihi penerimaannya sehingga terjadi defisit anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Defisit anggaran akan mempengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi pada pasar barang dan jasa serta pasar uang. Kedua pasar tersebut akan berpengaruh pada besarnya permintaan agregat yang juga akan mempengaruhi besarnya inflasi karena defisit anggaran akan menimbulkan ekspansi moneter yang akan meningkatkan jumlah uang yang beredar terutama defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri. Sedangkan pemerintah Indonesia membiayai defisit anggaran melalui utang luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan PDB Indonesia cenderung moderat dan tidak mencapai peningkatan yang signifikan.

Pada kurva Rahn juga menjelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah melebihi titik maksimal yang tidak sebanding dengan penerimaannya, maka akan terjadi penurunan pada PDB riil pada negara tersebut. Hasil penelitian dari Kunarjo (2001) juga membuktikan bahwa

defisit anggaran yang semakin besar akan berdampak buruk pada pertumbuhan PDB di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia melalui komponen kebijakan fiskal di Indonesia. Apakah melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pendapatan nasional (PDB riil) di Indonesia dengan menggunakan data tahunan dari tahun 1984 hingga tahun 2015.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* dengan rentang waktu penelitian dari tahun 1984 sampai dengan 2015 yang bersumber dari Nota Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan situs resmi lainnya. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi terhadap pertumbuhan PDB riil di Indonesia dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_t$$

dimana:

Y = Produk Domestik Bruto (milyar rupiah)

b_0 = konstanta persamaan regresi

b_1, b_2, b_3 = koefisien variabel independen

X_1 = penerimaan negara dari pajak (milyar rupiah)

X_2 = penerimaan negara bukan pajak (milyar rupiah)

X_3 = pengeluaran negara (milyar rupiah)

e = variabel pengganggu

t = data *time series*

Nilai koefisien regresi dalam penelitian ini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal ini berarti jika koefisien β bernilai positif maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen, demikian pula sebaliknya.

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1 Nilai *mean, median, maximum, minimum, standard deviasi* dari masing-masing variabel

	PDB R	TX	NTX	GOV
Mean	2223731	327380.5	120987.3	449534.1
Median	874571.6	91997.50	63915.85	213927.7
Max	8976932	1379992	410340.9	1876873
Min	329775.9	4788.300	707.7000	9017.900
Std. Dev	2856205	416782.3	131955.9	554854.7
Obs	32	32	32	32

Hasil Estimasi *Ordinary Least Square* (OLS)

Tabel 2 Hasil estimasi OLS

	C	$b_1 (X_1)$	$b_2 (X_2)$	$b_3 (X_3)$
Coeffisin	456953.4	12.08024	-20.17198	0.561682

t-statistik	2.203369	7.520535	-3.743538	1.085734
Probabilitas	0.0360	0.0000	0.0008	0.2869
R-Square	0.928746			
Adj. R-Squ	0.921112			
Prob F-sta	0.000000			

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, hasil estimasi menunjukkan variabel penerimaan negara dari pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDB riil di Indonesia. Sementara itu, pada variabel non pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Akan tetapi, variabel pengeluaran pemerintah secara keseluruhan tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDB riil di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan besarnya probabilitas dari variabel pajak, non pajak dan pengeluaran pemerintah. Nilai probabilitas dari variabel pajak dan non pajak sebesar 0,0000 dan 0,0008 yang lebih kecil dari tingkat α ($5\% = 0,05$). Sedangkan nilai probabilitas dari variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,2869 yang lebih besar dari tingkat α .

Nilai *Adj.R-Square* sebesar 0.921112 yang berarti 0.92% variabel pajak, non pajak, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB riil, sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model. Persamaan yang diperoleh $PDB_R = 456953.354794 + 12.0802413649 * TX - 20.1719792057 * NTX + 0.561682001006 * GOV$ yang menunjukkan pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDB riil di Indonesia dengan koefisien pajak sebesar 12.080 dan pengeluaran pemerintah sebesar 0.5616. Artinya, apabila penerimaan pemerintah dari pajak naik sebesar 1 milyar rupiah, akan menyebabkan PDB riil naik sebesar 12.080 milyar rupiah. Begitu juga ketika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 milyar rupiah akan menyebabkan PDB riil naik sebesar 0,5616 milyar rupiah. Sedangkan variabel non pajak berpengaruh negatif terhadap PDB riil di Indonesia yang ditunjukkan dengan koefisien non pajak sebesar -20.171, yang artinya apabila penerimaan non pajak naik sebesar 1 milyar rupiah maka PDB riil akan turun sebesar 20.171 milyar rupiah, dan sebaliknya.

Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap PDB riil di Indonesia

Hasil analisis data diperoleh bahwa penerimaan pajak signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena pajak sebagai penerimaan negara yang terbesar memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia.

Pengaruh Non Pajak terhadap PDB riil di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data membuktikan bahwa penerimaan negara bukan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Faktanya PNBP yang terbesar adalah dari penerimaan SDA Migas, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia akan semakin meningkat pula

kebutuhan migas di Indonesia sehingga semakin lama akan semakin berkurang migas di Indonesia karena migas adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, industri pertambangan migas juga memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan karena akan semakin berkurangnya kemampuan lingkungan untuk mengolah limbah secara alami sehingga dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB riil di Indonesia

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi penerimaannya sehingga sering terjadi defisit anggaran yang terus meningkat. Defisit anggaran menyebabkan timbulnya inflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya hubungan positif membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi baik di bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Kesimpulan

1. Penerimaan negara dari pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDB riil di Indonesia;
2. Penerimaan negara bukan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap laju PDB riil di Indonesia; dan
3. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDB riil di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah harus lebih memperbaiki dan mengawasi dalam sistem penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak, serta meminimalisir adanya kecurangan dalam sistem penerimaan pemerintah sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah;
2. Sistem alokasi yang tepat dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien yang dapat meningkatkan pendapatan nasional; dan
3. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lebih digunakan untuk pengeluaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan karena pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM termasuk pengeluaran pemerintah yang cukup besar.

Daftar Pustaka

- Deliarnov, 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kinarjo. 2001. *Majalah Perencanaan Pembangunan: Defisit Anggaran Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samuelson, Paul. A & Nordhaus William D. 1985. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- IMF & World Bank. 2006. *Fiscal Policy For Growth and Development: An Interim Report*.

